

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa keuangan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tergolong baik jika dilihat dari analisis kewajiban dan ekuitas dana.

1. Pertumbuhan kewajiban pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masih aman karena setiap kewajiban yang dimiliki telah dibayarkan dan tidak adanya tunggakan-tunggakan oleh pemerintah setempat. Maka analisis pertumbuhan kewajiban bisa dikatakan baik walaupun selalu berfluktuasi dalam pengelolaan keuangan untuk mengatasi kewajiban yang dimiliki.
2. Rasio kewajiban terhadap ekuitas dana pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tidak sangat terbebani oleh kewajiban. Pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai ekuitas dana yang besar untuk membayar kewajiban pemerintah sehingga kondisi ini dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dikatakan aman karena kewajiban pemerintah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan ekuitas dana yang dimiliki. Dilihat dari pencapaian yang naik turun juga sesungguhnya kewajiban yang ditanggung masih dalam tahap wajar.
3. Rasio kewajiban terhadap total Aset pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2016 sampai tahun 2020 menunjukkan bahwa

pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai aset yang besar untuk membiayai kewajibannya sehingga kondisi ini dikatakan aman karena kewajiban pemerintah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki, dan aset yang dimiliki masih dapat menjamin kewajibannya.

4. Rasio kewajiban terhadap pendapatan daerah menunjukkan kondisi yang aman karena nilai rasio dari tahun ke tahun mengalami penurunan, walaupun di tahun 2019 terjadi sedikit peningkatan namun masih menunjukkan posisi yang aman bagi pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara dan tidak berpengaruh besar antara nilai kewajiban terhadap pendapatan daerah. Rasio kewajiban terhadap pendapatan daerah dikatakan kurang aman jika total kewajiban lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah yang dimiliki oleh pemerintah.
5. Pertumbuhan ekuitas dana dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016, 2017 dan 2019 kondisi ekuitas dana masih dikatakan aman karena adanya peningkatan dan peningkatan ini menunjukkan kondisi pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara yang baik, namun pada tahun 2018 dan tahun 2020 ekuitas dana pemerintah menurun sebesar -2,7% dan juga -25%.
6. Proporsi ekuitas dana dan proporsi kewajiban dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dikatakan aman karena kewajiban dan ekuitas dana pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sudah mencerminkan adanya

harmonisasi antara sumber pembiayaan eksternal dan pembiayaan internal sehingga mengkombinasi antara kewajiban dan ekuitas dana secara optimal

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, agar pengelolaan kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara kedepan semakin lebih baik maka disarankan :

1. Pemerintah daerah sebaiknya tidak menunda pengembalian hutang PFK, pembayaran Hutang beban, dan pembiayaan lain yang terjadi setiap tahunnya
2. Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara diharapkan juga mengendalikan kewajiban dan ekuitasnya dengan baik sehingga setiap tahun pembiayaan yang ada semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifudin. 2001, Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Assidiqi, Bahrun., 2014. “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012”. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan daerah*. Jakarta: Indeks.
- Fahmi, Irham. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Lampulo: ALFABETA
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah* – edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Marfiana, 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Ekonomi Universitas Sebelas Maret*.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Virgasari, Aviva. 2006. Hubungan Antara Opini Auditor pada Laporan Keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum dengan Kinerja Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Brawijaya Malang.